

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (Biro HOH) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di pengelolaan sumber daya manusia, hukum dan kehumasan.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Biro HOH - BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

LAKIP Biro HOH Tahun 2014 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
2. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010
3. Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2013.

LAKIP Biro HOH ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional maupun Internasional.

Selanjutnya dengan tersusunya LAKIP Biro HOH, maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Biro HOH.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon II lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja.
3. Menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakudi Republik Indonesia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Biro HOH adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro HOH.

Tujuan penyusunan LAKIP Biro HOH adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro HOH BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro HOH.

I.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro HOH BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro HOH BSN

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro HOH BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro HOH BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001

tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi Biro HOH BSN terdiri dari :

**Bagian
Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

**Bagian
Organisasi
dan
Kepegawaian**

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan evaluasi penerapan manajemen mutu internal, serta melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisa, evaluasi dan perumusan struktur organisasi dan tata laksana;
- b. pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Manajemen Mutu Internal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

**Bagian
Humas**

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum, Organisasi dan Humas

I.3.2 Sumber Daya Manusia Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2014 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 25 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1 Pegawai Biro HOH BSN

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro	1
1.	Bagian Hukum	4
2.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	14
3.	Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	6
	Jumlah	25

I.4 PERAN STRATEGIS BIRO HOH BSN

Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, pada peran legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kehumasan.

Berikut ini merupakan identifikasi rincian mengenai potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan Biro HOH BSN dalam mendukung pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia ke depan.

Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Biro HOH BSN

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Undang-Undang SPK telah disahkan	Struktur organisasi, program, perencanaan dan anggaran BSN belum sesuai UU SPK	Kajian implikasi RUU SPK terhadap kebijakan dan perencanaan strategis BSN, termasuk organisasi, anggaran, dan kegiatan BSN.
	UU SPK belum didukung peraturan perundangan di bawahnya. Diperlukan PP, Perpres, dan beberapa peraturan teknis lainnya	Menyiapkan RPP, Perpres dan beberapa peraturan teknis lainnya sebagai turunan UU SPK.

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
SDM BSN baik jumlah maupun tingkat pendidikan	Belum adanya rencana pengembangan SDM jangka menengah dan jangka panjang yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan “grand design pengembangan SDM” secara bertahap dan berkelanjutan • Penyusunan rencana kebutuhan SDM untuk jangka panjang (5 tahun kedepan) • Penyusunan sistem pengembangan SDM secara terpadu menggunakan elektronik sistem
	Belum dibuatnya sistem pemberian tunjangan kinerja yang berdasarkan kinerja individu dan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem penilaian kinerja individu yang dapat mencerminkan prestasi kerja yang digunakan untuk memberikan tunjangan kinerja yang sesuai • Penyusunan sistem <i>rewarding</i> dan <i>punishment</i> untuk mendukung profesionalisme SDM
	Layanan kepegawaian belum dilakukan secara profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SOP layanan kepegawaian • Pengembangan sistem layanan kepegawaian yang terpadu berupa sistem elektronik (electronic human capital management/e-HCM)
	Belum adanya program diklat berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar kompetensi SDM untuk pejabat struktural dan fungsional • Penyusunan <i>Training Need Analysis</i> (TNA)

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program diklat berbasis kompetensi • Evaluasi efektifitas dan efisiensi diklat pegawai
SDM BSN kebanyakan berada dalam usia produktif	Belum adanya pola karir pegawai BSN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan pedoman pola karir untuk SDM • Penyusunan pedoman untuk peningkatan kesejahteraan BSN
	Belum adanya program pembinaan pegawai untuk menangani generasi “Y” untuk peningkatan kinerja organisasi	Program pembinaan terkait dengan disiplin, kode etik, budaya kerja dll
Branding Kelembagaan	BSN sebagai lembaga yang diberi tugas untuk membina dan mengembangkan standardisasi di Indonesia “Belum” dikenal secara luas oleh masyarakat.	Penyusunan strategi untuk membranding BSN. <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur : Logo dan gedung BSN, kendaraan operasional, ruang layanan publik, ID Card pegawai, template presentasi 2. Konteks : <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SNI terkait K3L - Peran Akreditasi, MLA & MRA. - Efektivitas Networking BSN. 3. Konten <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas SNI & produk turunannya. - Pengembangan SI SPK. - PTSP dan Integrasi SI SPK dengan Back Office BSN, K/L & Pemda

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2010-2014, maka Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut :

Rencana Strategis Biro HOH BSN 2010 - 2014 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI

“Menyediakan SDM Profesional , Informasi aktual
kelembagaan dan peraturan Perundang-undangan yang implementatif.”

MISI

1. Merencanakan dan mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan BSN secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan pelayanan prima dibidangi kepegawaian .
3. Memfasilitasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
4. Menyusun peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi;
5. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama stakeholder terhadap BSN;
7. Memperluas jaringan kemitraan yang mendukung pencitraan lembaga.
8. Membangun Citra Kelembagaan yang baik dan dikenal masyarakat luas (Nasional dan Internasional).

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

SASARAN

Pada tahun 2014 sasaran Biro HOH BSN adalah :

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
3. Terlaksananya reformasi birokrasi.
4. Tersedianya publikasi kelembagaan yang handal.

KEBIJAKAN

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Secara Menyeluruh

PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Biro HOH BSN yang disempurnakan sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Biro HOH BSN Tahun 2013- 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2013	Target 2014
1.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang – undangan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1 Dok	1 Dok
		Jumlah Produk Hukum BSN	100 Dok	100 Dok
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan	3 Paket)	3 Paket
3.	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar	Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan	10%	10%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2013	Target 2014
	lembaga	SNI dimedia massa (cetak, elektronik dan online)		
		Persentase peningkatan pengunjung pameran	10%	10%
4.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80%	80%

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Biro HOH BSN tahun 2014 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang – undangan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1 Dok
		Jumlah Produk Hukum BSN	100 Dok
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan	3 Paket
3.	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI dimedia massa (cetak, elektronik dan online)	10%
		Persentase peningkatan pengunjung pameran	10%
4.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro HOH BSN menetapkan 4 (empat) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Dokumen Peraturan Perundang – undangan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersusunnya peraturan perundang-undangan. Dengan indikator Jumlah Dokumen Peraturan Perundang – undangan dibidang standardisasi.

Cara perhitungan IKU ini adalah :

“Memperhitungkan jumlah draft Peraturan perundang-perundangan yang diusulkan oleh BSN ke Legislator”.

2. Jumlah Produk Hukum BSN

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersusunnya peraturan perundang-undangan. Dengan indikator jumlah produk hukum BSN yang ditetapkan oleh Kepala BSN.

Cara perhitungan IKU ini adalah :

“Membandingkan jumlah produk hukum yang diusulkan ke Bagian Hukum dan yang ditetapkan oleh Kepala BSN. dikalikan 100%”.

3. Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur peningkatan kompetensi SDM BSN. Dengan indikator Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan.

Cara perhitungan IKU ini adalah :

“Memperhitungkan jumlah pelatihan SDM yang dikutsertakan sesuai dengan analisis kebutuhan”

4. Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI dimedia massa (cetak elektronik dan online)

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Dengan indikator persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI di media massa (cetak elektronik dan online).

Cara perhitungan IKU ini adalah :

“Memperhitungkan persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI dimedia massa (cetak elektronik dan online)”

5. Persentase peningkatan pengunjung pameran

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Dengan indikator persentase peningkatan pengunjung pameran

Cara memperhitungkan persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan total jumlah temuan.

6. Nilai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi .

Cara memperhitungkan Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan menghitung capaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Biro HOH BSN Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3 Pemetaan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Biro HOH BSN Tahun 2014**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian		
1.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan.	Persentase Jumlah Dokumen Peraturan Perundang – undangan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	90%
		Jumlah Produk Hukum BSN	100 Dok
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan	3 Paket
3.	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI dimedia massa (cetak, elektronik dan online)	10%
		Persentase peningkatan pengunjung pameran	10%
4.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (Dua) kegiatan.

Dari 2 (dua) kegiatan tersebut, 1 (satu) kegiatan merupakan Kegiatan Prioritas Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, yaitu Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan 1 (satu) kegiatan merupakan kegiatan prioritas lembaga, yaitu Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Perundang-undangan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (RUU SPK).

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN,

dilaksanakan melalui :

- a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,
- b. Pengkajian/Penelaahan/Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundangan-Undangan,
- c. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN,
- e. Pembinaan dan Pengembangan Kehumasan, serta pengelolaan Unit Layanan Informasi Publik (ULIP),
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro HOH BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2014 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2014

N O	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN%
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
1	Tersusunnya peraturan perundang-undangan.	Persentase jumlah Peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN	90%	95%	106%
		Jumlah Produk Hukum BSN	100 Dok	252 Dok	252%
2	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan	3 Paket	3 paket	100%
3	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI dimedia massa (cetak, elektronik dan online)	10%	11%	110%
		Persentase peningkatan pengunjung pameran	10%	8%	80%
4	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80	70,18	87,73

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan.
2. Mempertahankan opini atas laporan keuangan.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian.

4. Terlaksananya reformasi birokrasi
5. Meningkatnya peran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
6. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik BSN

Sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Organisasi dan Humas adalah Sasaran 1, Sasaran 3 dan Sasaran 4. Selanjutnya sasaran tersebut dalam LAKIP Biro HOH ini secara berurutan menjadi Sasaran :

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
3. Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
4. Terlaksananya reformasi birokrasi

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Tersusunnya peraturan perundang-undangan
----------------------------	---

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan / (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
1. Persentase Jumlah Peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN	90%	95%	106%	94%	1%
2. Jumlah Produk Hukum BSN	100 Dok	252 Dok	252%	110	229%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tersusunnya peraturan perundang-undangan adalah persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN dan jumlah produk hukum BSN.

Untuk mendukung kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, pada Tahun 2014 Badan Standardisasi Nasional menerbitkan 6 (enam) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang berkaitan dengan Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Komite Teknis, Tim dan lain-lain. Seluruh Produk Hukum tersebut merupakan realisasi dari 303 usulan. Ini berarti realisasi tahun 2014 mencapai 95% atau dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 106%.

Pencapaian target pada Tahun 2014 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 106%. Tercapainya target pada Tahun 2014 lebih dari 100% tidak terlepas dari peningkatan usulan/permintaan penetapan peraturan perundang-undangan dari internal maupun eksternal BSN. Terlepas dari keberhasilan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat sedikit kendala pada proses pembahasan dan atau konfirmasi, klarifikasi maupun koordinasi dengan unit kerja pengusul dan atau unit kerja terkait lainnya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada dan pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang bersamaan. Namun demikian, kendala tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capaian target yang telah ditentukan.

Sementara itu untuk indikator kinerja jumlah produk hukum dengan target 100 produk hukum telah melebihi target yaitu 252 produk hukum atau sebesar 252%. Capaian untuk indikator kinerja jumlah produk hukum yang melebihi target disebabkan karena peningkatan kebutuhan SNI sehingga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produk hukum. Selain itu dengan disahkannya UU No.20 Tahun 2014 jumlah keputusan tentang komite teknis perlu disesuaikan.

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
--------------------------------	--

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan / (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
3. Jumlah Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan	3 Paket	3 paket	100%	100 %	0

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kompetensi SDM adalah jumlah pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan.

Dimana pada tahun 2014 dari target yang ditetapkan yaitu 3 paket pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan telah mencapai target 100% karena 3 (paket) Pelatihan SDM telah dilaksanakan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dan
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Sementara itu kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini adalah beberapa personil yang sudah dijadwalkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik struktural, teknis maupun fungsional tidak dapat mengikuti karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan serta pergeseran waktu pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh pihak penyelenggara.

SASARAN 3	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga
----------------------	---

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan/ (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
4. Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI di media massa (cetak, elektronik dan online)	10%	8%	80%	104%	24%
5. Persentase peningkatan pengunjung pameran	10%	11%	110%	129%	19%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

a. Persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI di media massa (cetak, elektronik dan online) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Peliputan pelaksanaan kegiatan BSN

Kegiatan peliputan pelaksanaan kegiatan BSN ini dilakukan dengan menugaskan beberapa staff bagian humas untuk meliput kegiatan – kegiatan strategis BSN ditahun 2014 baik didalam kota maupun diluar daerah seperti kegiatan pembahasan RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan sebagainya penandatanganan kerjasama, sidang – sidang lingkup nasional dan Internasional.

2. Monitoring Pemberitaan Standardisasi

Kegiatan monitoring pemberitaan ini dilakukan dengan cara memonitoring pemberitaan di media cetak seperti koran, majalah dan buletin terkait pemberitaan standardisasi yang jika ada pemberitaan terkait hal tersebut maka segera staff bagian humas akan menscan dan mendokumentasikan kedalam e file. Dokumentasi pemberitaan tersebut dijadikan dan disajikan kepada pimpinan BSN sebagai bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan terkait standardisasi.

3. Pengelolaan Unit Layanan Informasi Publik (ULIP)

Dalam mewujudkan hak atas informasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang – Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No, 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu maupun badan hukum untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang – undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisiensi, dan akuntabel.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam melaksanakan amanat UU tersebut dalam pengelolaannya dalam Tahun 2014 telah melakukan monitoring penanganan informasi sebanyak 200 informasi dengan informasi dikarenakan tidak memenuhi syarat dan sulit dipahami.

Sementara itu jumlah keberatan yang diterima selama tahun 2014, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, serta permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang tidak ada.

Dari ketiga kegiatan tersebut dalam mencapai penetapan kinerja persentase peningkatan pemberitaan BSN dan SNI di media massa (cetak, elektronik dan online) yang ditargetkan 10% atau sebesar 1.497 capaian kinerjanya 8% atau sebesar 1.197 berita sehingga prosentase kinerja sebesar 80%. Kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan adalah terbatasnya jumlah personal dan anggaran bagian humas dalam melakukan peliputan pemberitaan seluruh kegiatan BSN.

b. Persentase peningkatan pengunjung pameran

Untuk indikator persentase peningkatan pengunjung pameran pada tahun 2014 menetapkan target 10% atau 2.700 orang pengunjung pameran yang ditetapkan dan terealisasi 2.970 orang pengunjung atau 110%

Kegiatan pameran yang telah diikuti antara lain :

Nama Pameran	Pelaksanaan
a. Pameran Agrinova	IPB, 21 - 22 November 2014
b. Kalsel Expo	Banjarbaru, 21 - 23 Agustus 2014
c. Pameran Bioteknologi	Palembang, 1 - 4 September 2014
d. Pameran Bioteknologi	Bogor, 24 - 28 September 2014
e. Pameran Gelar Inovasi UMKM	Semarang, 7 - 12 Mei 2014
f. Pameran PENAS	Malang, 7 - 12 Juni 2014
g. Pameran Indobuildtech	JCC, 11 - 15 Juni 2014
h. Pameran Indonesia Quality Expo	JCC, 12 - 14 November 2014
i. Pameran Laboratorium Indonesia	JCC, 7 - 9 Mei 2014
j. Pameran Perdagangan & Perlindungan Indonesia	Bidakara, 23 April 2014
k. Pameran Perindustrian	Kemenperin, 12 - 14 Maret 2014
l. Pameran Ritech	Gedung II BPPT, 9 - 12 Agustus 2014
m. Pameran SMESCO	JCC, 19 - 22 Juni 2014
n. Pameran Batik, Indocraft dan Fashion	JCC, 24 - 28 September 2014

Untuk kegiatan pameran ini pengunjung pameran melebihi target yang ditetapkan dikarenakan banyak kegiatan yang dilaksanakan secara gratis sehingga kesempatan untuk mengikuti pameran lebih banyak.

SASARAN 4	Terlaksananya reformasi birokrasi
--------------------------------	--

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2014			Realisasi	Peningkatan / (penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian	2013	
6. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80	70,18	87,73	0	0

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terlaksananya reformasi birokrasi adalah tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sebagai instansi pemerintah, BSN melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Sebagai sekretariat pelaksanaan reformasi Birokrasi adalah Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum, Organisasi dan Humas. BSN melaksanakan 8 (delapan) program/area perubahan ditambah 1 (satu) program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada program manajemen perubahan, telah dilakukan internalisasi manajemen perubahan, pembentukan dan pelatihan agen perubahan (*agent of change*). Agen perubahan dimaksudkan sebagai *role model* dalam menerapkan budaya kerja yang baik dalam organisasi.

Hasil pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2014 yaitu 1). Identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis; 2). Inventarisasi peraturan yang telah dicabut dan revisi atas peraturan perundangan yang tidak harmonis, 3). Penerapan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan; serta 4). Menyempurnakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi telah melaksanakan evaluasi dan mengajukan perubahan organisasi. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Program Penataan Tata Laksana pada tahun 2014 dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis elektronik untuk memudahkan pelaksanaan proses kerja dan layanan BSN. Aplikasi yang telah dibuat di tahun 2014 yaitu aplikasi manajemen jabatan dan aplikasi dossier, serta menyusun pedoman tata naskah dinas elektronik berbasis elektronik. Pada tahun 2014 telah dilakukan penambahan ruang lingkup sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001 atas pelaksanaan proses kerja di BSN. Penambahan ruang lingkup itu meliputi : kerjasama standardisasi, pengelolaan peraturan perundangan dan kehumasan, pengelolaan perencanaan, keuangan dan tata usaha serta pengawasan internal. Sehingga pada tahun 2014 seluruh proses kerja BSN telah disertifikasi.

Penataan Sistem Manajemen SDM dilakukan dengan *updating database* pegawai BSN, pelaksanaan dan pemantapan sistem presensi pegawai serta menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai BSN dalam rangka melakukan penilaian kinerja individu sebagai pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja.

Program Penguatan Akuntabilitas peningkatan kompetensi SDM terkait akuntabilitas kinerja melalui workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Ess. I, II dan perwakilan unit kerja dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan pada tahun 2014 telah menghasilkan Pedoman Penanganan Gratifikasi, Dokumen Sistem Pengendalian Internal untuk 10 unit kerja, Pedoman *Whistle Blowing System*, serta Pedoman Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan melalui pembuatan bahan publikasi dan informasi standardisasi, temu pelanggan layanan diklat standardisasi.

Program Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melalui pertemuan pokja, pertemuan evaluasi capaian *Quick Wins* dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penyusunan rencana aksi 2014 dan 2015 pelaksanaan reformasi birokrasi.

Program-program tersebut merupakan program pengungkit, yang akan menghasilkan sasaran :

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, yang ditunjukkan dengan Hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi BSN yaitu 2,88 (skala 1-4)
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi . Kemenpan memberi nilai 0, BSN menjustifikasi dengan nilai 2,8 dari skala 4 atau setara nilai lainnya.
 - b. Opini WTP dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Kualitas Pelayanan Publik, yang ditunjukkan dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan sebesar 3.14 dengan skala 4. Nilai tersebut berdasarkan hasil PMPRB BSN tahun 2014.

Hasil PMPRB yang dikoordinir oleh inspektorat BSN mendapat nilai 70,18. Namun dari hasil tersebut dan verifikasi lapangan dari Kementerian PAN dan RB, pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN dinilai 54,22. Hal ini karena terjadi perubahan kriteria dan bobot penilaian oleh KemenPAN dan RB. Sebagai rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, telah disusun Rencana Aksi per program RB untuk tahun 2014 dan 2015.

BSN baru mengusulkan dokumen *roadmap* pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai tahun 2012, sehingga penilaian dilakukan pada tahun 2013. Persentase capaian kinerja tahun 2014 terhadap target adalah 95%. Sedangkan persentase capaian terhadap target turun menjadi 87,73%. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa hal ini terjadi karena adanya perubahan kriteria penilaian dari Kementerian PAN dan RB pada saat dilakukan evaluasi.

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2014 ini Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu anggaran Biro HOH BSN sebesar Rp. 13.556.723.000,- dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.683.128.331,- atau sebesar 94,0%. Pagu dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2014

Dalam rupiah

No	Uraian	2014		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	4.538.592.000	4.115.492.352	91%
	a. Produk Hukum	538.592.000		
	b. Peraturan perundang - undangan dibidang standarisasi dan penilaian kesesuaian	4.000.000.000	3.744.265.002	
2	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	5.798.498.000	5.579.360.507	96%
	a. Paket Pengembangan SDM	3.971.977.000	3.850.492.595	
	b. Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3.219.633.000	2.835.619.925	
3	Bagian Humas	1.826.521.000	1.728.867.912	95%
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	1.826.521.000	1.728.867.912	
	Jumlah	13.556.723.000	12.683.128.331	94%

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2014 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro HOH Tahun 2014 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro HOH BSN Tahun 2014, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.